

THE POSITION OF PANCASILA VALUE ON CIVICS STUDY IN THE FORMATION OF CHARACTER NATION

POSISI NILAI PANCASILA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

Ana Andriani

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: ana.andriani@gmail.com

ABSTRACT

This paper is intended to look at the position of Pancasila values in Civics Education to build the students nation's character. This research was done to see the extent to which the role of Pancasila as part of the subject matter Civics Education, and as a nation ideology capable of forming national character in students. Pancasila values in subjects Citizenship Education is expected to be a guideline in everyday life, whether in the classroom, and outside the classroom. For guidance in the life of society, nation, and state, Pancasila is capable of forming national character in students.

Keywords: *Pancasila, Citizenship education, Nation Character.*

ABSTRAK

Tulisan ini dimaksudkan untuk melihat posisi nilai Pancasila pada PKn untuk membangun karakter bangsa siswa. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana peranan nilai Pancasila sebagai bagian dari materi pada mata pelajaran PKn, dan sebagai sebuah ideologi bangsa mampu membentuk karakter bangsa pada siswa. Nilai Pancasila pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kelas, maupun di luar kelas. Sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pancasila mampu membentuk karakter bangsa pada siswa.

Kata Kunci: *Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Karakter Bangsa.*

Salah satu peranan pendidikan adalah memberikan pembekalan/ pengetahuan, melatih, dan meningkatkan potensi diri peserta didik serta memberikan aneka pengalaman belajar (pelakonan diri) sesuai dengan target substansil atau pola proses KBM-nya. Dalam mengembangkan pendidikan atas dasar prinsip sistem among, Ki Hadjar dewantara (1962, hlm. 107) menyusun alat-alat pendidikan, berupa: 1) pemberian contoh (teladan); 2) pembiasaan; 3) pengajaran; 4) Perintah, Paksaan, dan hukuman; 5) laku (*zelf-beheersching, self-discipline*), dan 6) pengalaman lahir dan batin (*nglakoni, ngrasa, beleaving*). Seperti yang dikatakan Djahiri (1992, hlm. 2) tentang nilai

sebagai berikut: Nilai adalah sesuatu yang berharga menurut standar logika (benar-salah), estetika (bagus-buruk), etika (adil/layak-tidak adil), agama (dosa-haram-halal), dan hukum (sah-absah) serta menjadi acuan atau sistem keyakinan diri maupun kehidupannya.

PKn telah muncul dengan berbagai nama dan program, namun pada intinya mata pelajaran ini mempersiapkan warga negara. PKn (*Citizenship Education*) merupakan salah satu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan

berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2003, hlm. 2) Secara konseptual PKn memusatkan perhatian pada program pendidikan disiplin ilmu politik, sebagai substansi induknya. Secara kurikuler PKn berorientasi kepada pengadaan dan peningkatan kemampuan profesionalisme guru PKn. Sebagaimana lazimnya suatu sistem keilmuan, PKn menurut Winataputra (2006, hlm. 5) seyogyanya dilihat dari dimensi-dimensi: “(1) *nomenklatur* atau *terminologi* yang digunakan, (2) *Visi, misi, dan strategi akademik*, (3) *ontologi*, (4) *epistemologi*, dan (5) *aksiologi*”. Maka dalam kerangka berpikir seperti ini paradigma PKn akan dibahas dari berbagai pemikiran teoritis dan praktis PKn.

Menurut Winataputra (2006, hlm. 5), “Ada tiga terminologi yang banyak digunakan yakni *civics*, *civic education*, dan *citizenship education*”. Adapun sejarah pembentukan *Civics Education*, yakni berawal dari *Civics* yang mengambil bagian dari Ilmu Politik, yaitu demokrasi politik. Bahwasanya *Civics* sudah menjadi ilmu yang tersendiri, sudah diakui oleh para sarjana, Misalnya, Creshore meyebutkan *Civics* dengan “*the science of citizenship*”. Karena konsep tentang *Civic Education* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan *civics* atau Ilmu Kewarganegaraan di Amerika, sebagai negara asal *civics* dan *civics education*. Untuk menjelaskan batasan istilah PKn di Indonesia, sebaiknya perlu diketahui pula latar belakang pertumbuhannya di Amerika. Secara histories, *Civics Education* dapat digambarkan pertumbuhannya sebagai berikut : (a) *Civics* (1970), (b) *Civics Education* (Harold Wilson, 1901), (c) *Community Civics* (W.A. Dunn, 1907), (d) *Civics-Citizenship Education* (John Mahoney, 1945), (e) *Civics-Citizenship Education* (NCSS, 1971).

Secara paradigmatis, *citizenship education* memiliki **visi sosio-pedagogis** mendidik warga negara yang demokratis dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup konteks pendidikan formal dan pendidikan non-formal, seperti yang secara konsisten diterapkan di UK (QCA: 1998; Kerr: 1999; Winataputra, 2006). Berdasarkan dari kajian teoritis dan diskusi reflektif, maka

dirumuskan visi PKn dalam arti luas, yakni sebagai sistem PKn agar berfungsi sebagai: (1) program kurikuler dalam konteks pendidikan formal dan non-formal; (2) program aksi sosio-kultural dalam konteks kemasyarakatan; (3) bidang kajian ilmiah dalam wacana pendidikan disiplin ilmu sosial. Sedangkan visi PKn mengandung dua dimensi yakni (1) dimensi substantif berupa muatan pembelajaran (*content and learning experiences*) dan objek telaah serta obyek pengembangan (aspek ontologis), dan (2) dimensi proses berupa penelitian dan pembelajaran (aspek epistemologis dan aksiologis). (Winataputra, 2006, hlm. 7). Dalam konteks proses reformasi menuju Indonesia baru dengan konsepsi “masyarakat madani” sebagai tatanan ideal sosio-kulturalnya, maka PKn mengemban **misi sosio-pedagogis, sosio-kultural, dan substantif akademik**. Selanjutnya Winataputra (2006: 9) menjelaskan tentang misi tersebut sebagai berikut:

1. Misi sosio-pedagogis adalah mengembangkan potensi individu sebagai insan Tuhan Yang maha Esa dan makhluk sosial menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius.
2. Misi sosio-kultural adalah memfasilitasi perwujudan cita-cita, sistem kepercayaan/ nilai, konsep. Prinsip, dan praksis demokrasi dalam konteks pembangunan masyarakat madani Indonesia melalui pengembangan partisipasi warga negara secara cerdas dan bertanggungjawab melalui berbagai kegiatan sosio-kultural secara kreatif yang bermuara pada tumbuh dan kembangnya komitmen moral dan sosial kewarganegaraan.
3. Misi substantif-akademik adalah mengembangkan struktur atau tubuh pengetahuan atau spektrum konstelatif PKn, termasuk di dalamnya konsep, prinsip, dan generalisasi mengenai dan yang berkenaan dengan *civic virtue* atau kebijakan Kewarganegaraan dan *civic culture* atau budaya

kewarganegaraan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan.

PKn dipandang sebagai mata pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam membentuk warga negara yang baik sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi negara Republik Indonesia. Saat ini *Citizen Transmission*, sebagai salah satu tradisi IPS, menurut Winataputra (2001, hlm. ii) sudah berkembang pesat menjadi suatu batang tubuh (*body of knowledge*) yang dikenal memiliki paradigma sistemik yang di dalamnya terdapat tiga domain *citizenship education* atau PKn, yakni domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural. Secara garis besar mata pelajaran PKn terdiri dari:

- a. Dimensi pengetahuan Kewarganegaraan (*civics knowledge*) yang mencakup bidang politik, hukum dan moral.
- b. Dimensi keterampilan Kewarganegaraan (*civics skills*) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Dimensi nilai-nilai Kewarganegaraan (*civics values*) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai-nilai religius, (Depdiknas: 2004).

“*Citizenship education*“ oleh Cogan (1999, hlm. 4) digunakan sebagai istilah yang bermakna “...*both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organizations, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen*“, yang bermakna sebagai pengalaman di sekolah dan di luar sekolah seperti di rumah, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, melalui media massa, dan lain-lain, yang berperan membantu proses pembentukan totalitas sebagai warga negara.

Suatu bangsa membutuhkan ideologi sebagai perangkat prinsip pengarah (*guiding principles*), yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan

mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Seperti yang dikatakan Wijaya (1986, hlm. 35) bahwa: “Suatu bangsa memerlukan landasan falsafah bagi kelangsungan hidupnya sekaligus berfungsi sebagai dasar dan cita-cita atau tujuan nasional yang hendak dicapai”. Negara Indonesia dibentuk melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Proklamasi merupakan puncak revolusi Pancasila yang menolak segala bentuk apapun yang tidak sesuai dengan ajaran Pancasila. Atas dasar itu maka kemerdekaan Indonesia merupakan kemerdekaan negara Pancasila. Antara negara Pancasila dan negara proklamasi tidak dapat dipisahkan. Predikat ini berdasar pada ketentuan konstitusional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Ketentuan ini mengandung makna bahwa Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia, sebagai norma dasar dan tertinggi dalam negara Indonesia, sebagai ideologi bangsa, sebagai identitas dan karakteristik, serta sebagai jiwa dan kepribadian bangsa serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Unsur-unsur dari Pancasila, sudah dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Nilai Pancasila dalam hal ini dimaknai sebagai pesan, semangat yang dijiwai oleh Pancasila. Nilai Pancasila mempunyai karakter tersendiri yang berbeda dengan lainnya. Menurut Engkoswara (2004, hlm. 38), “Nilai Pancasila ini dapat menjadi kebudayaan Pancasila, yaitu kebudayaan yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam berbagai segi kehidupan”.

Nilai Pancasila harus dibina, dikembangkan/ ditingkatkan di tengah kehidupan yang merupakan dampak sains secara global. Apabila terdapat kemandulan dan tumpulnya isi serta potensi afektif yang diiringi peningkatan intelektual ilmiah rasional, akan mampu melahirkan emosi NMNr (Nilai-Moral-Norma) dan dehumanisasi, seperti dikatakan Djahiri (1996, hlm. 55), “...pada titik tertentu manusia demikian akan menjadi arogan, pongah, amat mengandalkan dan mengagungkan otak dan kemampuannya dan bahkan bukan mustahil akan menyembah hasil ciptaannya sendiri”.

Filsafat Pancasila memiliki sistematika yang meliputi bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya merupakan kerangka dasar dalam kajian filsafat. Diakui, masih terdapat ajaran tentang metode serta pendekatannya. Di mana latar belakang sejarah dan motivasi, serta tujuan ajaran itu dapat tersendiri, tetapi dapat pula pengembangan dalam bidang yang terkandung secara profesional dan relevan dengan bidang-bidang dalam sistematika tersebut.

Rasa kebangsaan merupakan kesadaran berbangsa, yaitu kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa yang lahir secara alamiah karena sejarah, karena aspirasi perjuangan masa lampau, karena kebersamaan kepentingan, karena rasa senasib dan sepenanggungan dalam menghadapi masa lalu dan masa kini, serta kesamaan pandangan, harapan dan tujuan dalam merumuskan cita-cita bangsa untuk waktu yang akan datang. Dengan kata lain rasa kebangsaan adalah perekat yang mempersatukan dan memberikan dasar kepada jati diri sebagai bangsa.

Manifestasi wawasan kebangsaan ini, memenuhi seloka-seloka rumongso melu handarbeni (*sense of belonging*), rumongso melu hangrungkebi (*sense of participation*), dan mulat sariro hangroso wani (*sense of responsibility*). Kemajemukan bangsa Indonesia, membutuhkan pengelola yang mampu memelihara kemajemukan dalam kebersamaan. Maka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu yang harus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan, serta menuntut kesadaran dari semua unsur bangsa.

Budiyanto (2003, hlm. 1) mengatakan “dalam arti sosiologis, bangsa termasuk kelompok paguyuban yang secara kodrati ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu negara”. Dalam sebuah negara, rakyat harus tunduk dan patuh pada kekuasaan negara. Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu di dalam suatu negara, rakyat dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Sedangkan berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya, rakyat dapat dibedakan menjadi warga negara dan bukan warga negara. Rakyat dalam

jumlah besar merupakan kumpulan masyarakat yang membentuk negara disebut bangsa. Menurut Ernest Renan (dalam Budiyanto 2003, hlm. 2), bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat untuk bersatu) dengan perasaan kesetiakawanan yang agung. Sedangkan menurut Ratzel, bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antar manusia dan tempat tinggalnya. Hertz dalam bukunya *Nationality in history and Politics* (dalam Budiyanto, 2003, hlm. 5) mengemukakan bahwa ada empat unsur yang berpengaruh dalam terbentuknya suatu negara, yaitu:

- a. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas.
- b. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.
- c. Keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, atau kekhasan, contoh: menjunjung tinggi bahasa nasional yang mandiri.
- d. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh dan prestise.

Dengan melihat pada unsur pembentuk negara, maka terdapat karakter bangsa yang unik. di sini terkandung makna: sifat kejiwaan, atau tabiat yang dimiliki oleh bangsa. Khususnya dengan bangsa Indonesia, terkandung sifat kejiwaan atau tabiat yakni berupa nilai-nilai luhur yang merupakan warisan nenek moyang yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga bangsa Indonesia mempunyai ciri yang khas yang berbeda dengan bangsa lainnya.

METODE

Berdasarkan pada permasalahan di atas, selain menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dimana peneliti mencatat permasalahan secara seksama terhadap masalah-masalah yang muncul terkait dengan objek yang diteliti. Kemudian masalah ini dideskripsikan secara apa adanya. Walaupun sebetulnya perbedaan antara kedua pendekatan ini berkait dengan tingkat pembentukan pengetahuan dan proses penelitian; tingkat epistemologi yang cukup tipis, tingkat teori menengah (*middle range*) sebagaimana diuraikan dalam kerangka teoritis, serta tingkat metode dan teknik-teknik. (Brannen, 2005, hlm. 9).

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian kualitatif naturalistik, didasari oleh adanya suatu upaya untuk memahami bagaimana karakter bangsa dibentuk melalui nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn. Sejalan dengan itu, Sudjana dan Ibrahim (1989: 189) mengemukakan bahwa: Dengan pendekatan kualitatif-naturalistik ini dipandang sangat tepat karena tekanannya pendekatan kualitatif pada proses bukan hasil". Pendekatan kualitatif, dianggap sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, dengan alasan: 1) dengan melihat kenyataan di lapangan akan lebih mudah; 2) mengungkapkan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; 3) Bersifat lebih peka serta dapat lebih menyesuaikan diri dengan banyak faktor pengaruh terhadap kondisi yang dihadapi.

Metode deskripsi yang dipakai, digolongkan ke dalam jenis studi kasus, karena fokus penelitiannya telah ditentukan, yakni melihat gambaran tentang posisi nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn dalam pembentukan karakter bangsa. Dengan adanya penekanan dan penentuan fokus, maka peneliti menggunakan studi kasus sebagai alat kerjanya. Penelitian ini lebih menekankan pada tipe studi kasus, dikarenakan menyangkut masalah pembentukan karakter bangsa.

Maka tergambar secara jelas tentang karakteristik dari pendekatan kualitatif, sebagai instrumen penelitian, di mana peneliti menjadi pengumpul data utama dalam penelitian ini, serta menjelaskan secara

rasional yang dapat dipertanggung jawabkan mengenai penempatan peneliti yang tinggi sehingga mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah. Melalui pendekatan kualitatif yang dimaknai dalam menafsirkan data penelitian serta dengan memanfaatkan teori-teori yang dikemukakan sebagai landasan teoritik penelitian ini, diharapkan diperoleh temuan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan penelitian kuantitatif terkait secara khas dengan proses induksi enumeratif (induksi yang ditarik atas dasar penghitungan). Salah satu tujuan utamanya menurut Brannen (2005, hlm. 12) adalah "menemukan beberapa banyak dan jenis manusia apa saja dalam populasi umum dan populasi induk yang mempunyai karakter khusus yang ditemukan dalam populasi sampel". Pernyataan di atas, menjelaskan bahwa penggabungan kedua metode ini dapat dilakukan dengan berbagai faktor, sehingga masalah yang ada menjadi saling terkait dan penting untuk diuraikan.

Penelitian di lakukan di kota Purwakarta, dengan pertimbangan bahwa kota Purwakarta mempunyai karakter yang unik, terkait dengan letaknya. Purwakarta sering disebut juga sebagai kota transit. Sebutan ini cukup beralasan, disebabkan Purwakarta sebagai tempat persinggahan bagi pengguna jalan antara kota Jakarta menuju kota Bandung, juga ke kota Cirebon sebagai jalan utama menuju propinsi Jawa Tengah. atau sebaliknya. Dengan karakter seperti itu, berimbas pada pergaulan remaja serta anak muda yang sebagian merupakan siswa sekolah.

Di Purwakarta terdapat 21 Sekolah Menengah Atas, 11 sekolah merupakan sekolah negeri, selebihnya sekolah swasta. Penelitian ini diwakili oleh lima Sekolah Menengah Atas. Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di lima SMA, dengan perbandingan 3 sekolah negeri, dan 2 sekolah swasta. Sekolah-sekolah itu adalah: SMA Negeri 2 Purwakarta, SMA Negeri 1 Darangdan, Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta, SMA PGRI 3, dan SMA Pasundan. Pemilihan lokasi dilakukan dengan alasan sekolah-sekolah tersebut dapat mewakili sekolah negeri dan swasta di Purwakarta.

Ada empat teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu melakukan studi kepustakaan, observasi wawancara, dan dokumentasi, serta kuesioner yang disebar kepada siswa SMA se-kabupaten Purwakarta. Keempatnya diharapkan dapat melengkapi dalam memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan sumber data yang diperlukan dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder.

Di dalam penelitian ini, yang menjadi responden penelitian adalah, Para pakar PKn dan Pancasila, Para pengembang Kurikulum PKn, beserta guru-guru pengajar PKn yang berkaitan dengan proses pembelajaran PKn itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah diambil data yang diambil dari berbagai dokumen resmi, maupun tidak resmi, yang berhubungan dengan materi penelitian yang mendukung data primer. Selanjutnya analisis data yang digunakan melalui tahapan : 1) Orientasi; 2) Eksplorasi; 3) Member Check, dan 4) Triangulasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Posisi Pancasila Menurut Beberapa Pakar

1. Pendapat Pakar Pendidikan Kewarganegaraan

Posisi Pancasila sangat kuat karena mata pelajaran PKn dilaksanakan untuk pendidikan warga negara. Pancasila secara hukum adalah sebagai ideologi negara. Nilai-nilai isi Pancasila harus mewarnai kehidupan bernegara, serta harus mewarnai seluruh kehidupan bernegara, dimana ideologi terdiri dari: cita-cita negara; cita-cita bangsa; cita-cita unsur wilayah; cita-cita unsur rakyat; cita-cita unsur politik yang terbagi menjadi 2 yaitu: unsur politik luar negeri, serta unsur politik dalam negeri

Kontribusi nilai Pancasila terhadap pembentukan karakter bangsa adalah sejauh apa yang dijelaskan dalam perilaku warga negara, sejauh itu pula nilai-nilai Pancasila mewarnai hak dan kewajiban warga negara, memberikan arah sekalipun tidak keseluruhan. Pancasila merupakan kristalisasi dari: filosofis; sistem nilai; serta sistem budaya bangsa. Diharapkan melalui integrasi nilai-nilai Pancasila ini dapat

diimplementasikan dalam nilai-nilai kehidupan.

Nilai-nilai Pancasila atau kebangsaan pada prinsipnya mengadopsi dari nilai agama Islam, karena kalau dilihat dari sejarah perumusan dasar negara Pancasila dan pembuatan UUD 1945, yang merumuskannya mayoritas beragama Islam, maka wajar kalau nilai-nilai Islam masuk dalam nilai-nilai kebangsaan. Jika kita lihat urutannya, sila kesatu dari Pancasila merupakan nilai ketuhanan yang dijadikan sebagai dasar bagi sila-sila yang lainnya, sehingga dengan demikian kita sebagai manusia, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan akan selalu diawasi oleh Tuhan YME.

Nilai kemanusiaan menempatkan manusia pada posisi yang bermartabat atau terhormat sehingga pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia dengan cara yang manusiawi. Islam memandang orang yang baik ketika dia mampu menghargai sesama manusia. Kerakyatan pada prinsipnya sama dengan demokrasi, memiliki dua konsep, yakni: (1) Hikmat adalah nilai kebenaran yang datangnya dari Tuhan YME dan (2) Kebijakan atau kebijakan yang bersumber dari manusia.

2. Pendapat Pakar Pancasila

Karakter bangsa saat ini, khususnya setelah perang dingin selesai, sangat berbeda dengan pada saat negara di proklamasikan. Dulu kita bersatu padu tanpa membedakan suku bangsa untuk melawan penjajahan. Namun sekarang seolah masyarakat terkotak-kotak. Terlebih dengan diberlakukan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebetulnya ada kesempatan besar untuk tumbuh kembang pada daerah tersebut, namun perlu diingat bahwa peraturan daerah yang dibuat harus mengikuti Undang-undang.

Pendidikan Pancasila hendaknya diberikan pada saat usia kecil hingga dewasa. Di usia kecil, indoktrinasi dapat dilakukan dan sangat diperlukan, yang pada tahap selanjutnya kemudian dipelajari, dimengerti, dipahami, diujicobakan, akhirnya dilaksanakan. Antara pendidikan formal dan informal dapat saja berbeda, namun diharapkan Pancasila mampu menjembatani serta menyikapinya. Hal ini dapat dilakukan

dengan menghubungkan *essensial/ categorical values*, dalam wujud *life skill, instrumental values*.

Fenomena saat ini terlihat jelas adanya kesenjangan antara guru Pancasila di lapangan di satu sisi, dengan pusat pengembang kurikulum di sisi lain. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan kurikulum kurangnya sosialisasi di lapangan sehingga pesan yang ada tidak tersampaikan secara optimal, bahkan seringkali keberanian berkreasi di lapangan masih sering terbebani keraguan, membuat para guru mata pelajaran PKn di lapangan kebingungan.

Pancasila harus diajarkan secara keseluruhan, maka harus disusun program PKn pertahun, dari tahun ke-satu, dua, dan seterusnya, agar terjadi kesinambungan dan keterlanjutan. Dalam Pancasila sebagian boleh mengajarkan nilai kategorikal/ esensial seperti Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan. Namun diharapkan kita lebih kreatif dengan menggabungkan nilai kategorikal/esensial itu dengan nilai sehari-hari/ instrumental seperti hukum, politik, pengadilan, ekonomi, bisnis, olah raga, kesehatan, kesenian, HAM (Hak Asasi Manusia) dan sebagainya. Evaluasi yang dapat dipakai dalam pembelajaran PKn dapat bermacam-macam, namun meliputi kognitif untuk pengertiannya afektif untuk sikap, dan psikomotor melalui niatnya.

3. Pendapat Pakar Evaluasi

Resposisi didalam Pendidikan Kewarganegaraan perlu dilakukan dan dikembangkan dengan cara melalui pembangunan karakter bangsa. Tidak ada metode yang ampuh yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka dari itu diperlukan pemikiran dan kreativitas pendidik yang harus tanggap dan mampu membaca apa yang siswa dapat, serta tidak membuat jenuh siswa dalam pembelajaran di kelas.

Kebutuhan siswa merupakan orientasi sekolah. Jika kebutuhan seorang siswa ingin terlaksana maka seorang guru harus mengenal dulu siswanya. Bagaimana karakteristik siswa, guru harus dapat menyesuaikan diri, dan bukan sebaliknya. Untuk menilai ketercapaian dari proses pembelajaran, antara siswa dan guru harus saling dapat memperbaiki proses

pembelajaran tersebut (*Feed Back*). Unsur PKn yaitu: kognitif; afektif; psikomotor, ketiganya harus dinilai dengan alasan yang sesuai. Cara menilai kecakapan siswa dalam proses belajar yaitu dilakukan dengan dua cara yakni tes dengan angka dan nontest dengan deskripsi.

4. Pendapat Pengembang Kurikulum

Inti (*core*) PKn adalah pancasila. Namun saat ini Pancasila tidak begitu mewarnai serta tidak mendominasi pada mata pelajaran PKn, hal ini dikarenakan orang-orang masih dalam proses malu-malu kucing untuk menyebut Pancasila. Saat ini, Pancasila belum ditempatkan sebagai inti (*core*) PKn melainkan hanya baru disebut-sebut saja. Padahal idealnya, sekarang ini justru Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi inti pada mata pelajaran PKn. Hal ini dimungkinkan karena di negara manapun konstitusi tetap menjadi intinya. Karena konstitusi merupakan personifikasi dari cita-cita sebuah bangsa, maka sangat ideal apabila semangat kebangsaan di dalamnya mempelajari nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam konstitusi, walaupun Pancasila disejajarkan dengan aspek lain, tetap intinya adalah Pancasila.

Tidak ada satu metode yang dipakai dalam mengimplementasikan nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn dalam pembentukan karakter bangsa, tidak ada metode sebagai satu-satunya yang diandalkan, "*there is not panesy in education, we have to need so many*". Di sini Kompetensi berbeda-beda seperti Pengetahuan Kewarganegaraan "*Civics Knowledge*" berbeda dengan Perjanjian warganegara "*Civics Commitmen*". Metode mengajar harus berdasarkan kompetensi yang diajarkan. Sama halnya dengan evaluasi, maka evaluasi harus disesuaikan dengan standar isi yang diberikan. Evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk essay maupun pilihan ganda.

Peta Kompetensi sudah tidak dikembangkan lagi, dan semua mata pelajaran mulai dikembangkan. Peta Kompetensi Dasar yang dikembangkan pada Tahun 1999, memiliki delapan aspek, salah satunya adalah aspek nilai Pancasila. Dalam nilai Pancasila tersebut terdapat asas

demokrasi, musyawarah mufakat, dan asas Ketuhanan, dan lain-lain. Aspek ini dikembangkan mulai dari SD (Sekolah Dasar) sampai jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas) dari kelas I sampai XII. Aspek nilai Pancasila disesuaikan dengan perkembangan usia anak dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor.

Muatan nilai Pancasila mewarnai materi PKn baik di dalam KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) 2004, ataupun di dalam standar isi. Hal ini dapat dilihat bahwa salah satu aspek PKn adalah nilai-nilai Pancasila. Namun Saat ini ada kecenderungan guru alergi untuk mengatakan Pancasila, dikarenakan pada zaman rezim Soeharto, Pancasila sangat diagungkan dan pelaksanaannya banyak salah kaprah, sehingga masyarakat menjadi enggan untuk sekedar menyebut Pancasila.

Adapun pendekatan “*problem solving*” sangat sulit dilakukan oleh guru, karena guru sering terbentur antara fakta dan teori. Guru dituntut lebih responsif dengan masalah-masalah politik, akan tetapi sebagian besar memiliki rasa takut untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya. Maka guru harus membuat kelas-kelas pada pembelajaran PKn, agar menjadi kelas yang demokratis, sehingga tidak ada lagi tekanan, rasa takut, dan ketidak mampuan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada di lapangan. Mengenai metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKn sangat beragam, maka tidak hanya satu metode yang ideal untuk materi PKn, tetapi beragam yang disesuaikan dengan materi PKn.

Penilaian merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembelajaran, sedangkan PKn bukanlah mata pelajaran yang hanya mengukur kognitif saja, maka perlu penilaian yang sesuai dengan metodenya. Penilaian pada mata pelajaran PKn sebaiknya dalam bentuk essay, karena bentuk pilihan ganda banyak kelemahannya. Adapun bentuk evaluasi lain untuk PKn, dapat menggunakan *performance test*, *product*, *project* serta *portofolio*. Di dalam pelaksanaan evaluasi, guru PKn dapat berkolaborasi dengan guru lain, apabila sebelumnya telah disepakati bentuk penilaian seperti apa, bagaimana, bilamana, dsb.

Untuk membentuk karakter bangsa, saat ini ada suatu bentuk khusus, yang terdapat dalam Sub Pengembangan Diri, yang bukan merupakan mata pelajaran yang dikembangkan, melainkan mengembangkan kegiatan pembiasaan, kepramukaan dan keterampilan. Ada lima macam model pengembangan diri yang dikembangkan, salah satunya yaitu pengembangan keterampilan.

5. Pakar Implementasi PKn di Lapangan

Kontribusi nilai Pancasila untuk memperkaya materi PKn dalam pembentukan karakter bangsa, jelas sangat besar. Di dalam materi hakekat bangsa dan negara, dapat dilihat bahwa kita sebagai bangsa Indonesia perlu pembentukan jati diri bangsa, yang berkepribadian bangsa, dengan identitas bangsa seperti, ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Strategi yang dikembangkan dapat menggunakan CTL (*Contextual Teaching Learning*) yang bersifat aplikatif. Studi literatur dapat dilakukan sebagai pemahaman awal pada siswa yang selanjutnya diaplikasikan di lapangan. Banyak metode yang dapat dilakukan dalam pembelajaran PKn, diantaranya portofolio, yang sekaligus dapat dilakukan penilaian di dalamnya. Dalam portofolio semua tercakup, baik secara lisan, tulisan. Kreativitas anak, toleransi, menghargai pendapat orang lain, serta dalam menghargai waktu dapat menjadi penilaian tersendiri, dan ini sudah meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Secara materi PKn menyangkut Nilai-nilai berikut ini:

- a. Nilai fundamental: Ketuhanan, keimanan, Kemanusiaan, Kesatuan, Kerakyatan, Keadilan
- b. Nilai Instrumental: Penjabaran nilai-nilai fundamental yang merupakan penjabaran dari UU, PP, Keperes, Perda, dll. (sumber: Bapak Moerdiono)

Baik secara yuridis, historis, dan praksis, petunjuk hidup kita banyak terkandung dalam tata tertib sekolah, PP yang lebih operasional. Strategi yang dapat dipakai dalam memasukkan nilai Pancasila untuk memperkaya materi PKn dalam pembentukan karakter bangsa, yakni dengan menghubungkan materi yang dibahas

disesuaikan dalam kehidupan sehari-hari (keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara).

6. Guru Mata Pelajaran Pkn

Kontribusi nilai Pancasila ada, walaupun belum sepenuhnya dilakukan siswa melalui sikapnya sehari-hari. Strategi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran Pkn untuk pembentuk karakter bangsa dapat melalui berbagai cara, misalnya dengan menyisipkan nilai Pancasila dalam proses pembelajaran di dalam kelas, atau dengan melihat fenomena yang ada di lapangan saat itu.

Metode untuk pembelajaran ini tidak terbatas, banyak metode yang dapat dipakai, seperti studi kasus mengenai isu aktual, kontroversi isu, dll. Evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara pilihan ganda dan essay yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Hasil Kuesioner Siswa

1. Analisis Data Kuantitatif Respon Sikap Siswa di SMU Purwakarta Terhadap Pernyataan Nilai Pancasila

a. Respon Sikap Siswa Terhadap Item Pernyataan Nilai Pancasila.

Tabel 1. Respon Sikap Siswa Terhadap Pernyataan Nilai Pancasila

Respon Sikap	Bobot Skor	Frekuensi	Jumlah Skor	%
Sangat tidak setuju	1	28	28	0,15
Tidak setuju	2	90	180	0,99
Ragu-ragu	3	618	1854	10,20
Setuju	4	2102	8408	46,26
Sangat setuju	5	1541	7705	42,39
Jumlah		4379	18175	100

% jumlah skor dari total skor maksimum = $(18175/21895) \times 100\% = 83,01\%$

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2016

Tabel 1. di atas menunjukkan variasi respon sikap siswa terhadap pernyataan nilai Pancasila, walaupun terdapat siswa yang bersikap *sangat tidak setuju* tetapi frekuensinya sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,15%, bandingkan dengan siswa yang menyatakan dan bersikap *setuju* terhadap item pernyataan nilai Pancasila yang jumlah relatif besar yaitu 46,26%. Bahkan jika dianalisa berdasarkan prosentase jumlah skor secara keseluruhan, diperoleh interpretasi sikap kategori *sangat baik*, artinya secara

keseluruhan siswa merespon dengan sikap yang *sangat baik* terhadap item pernyataan nilai-nilai Pancasila.

b. Respon Sikap Siswa Per Sekolah Terhadap Item Pernyataan Nilai Pancasila

Analisis data selanjutnya dilakukan untuk mengetahui variasi respon sikap siswa berdasarkan masing-masing sekolah. Hasil pengolahan data berdasarkan lampiran A diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Respon Sikap Siswa Per Sekolah Terhadap Pernyataan Nilai Pancasila

Sekolah	% Skor					Total Skor	% Total Skor	Interpretasi
	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Ragu-ragu	Setuju	Sangat setuju			
SMA 2 Purwakarta	0,02	0,69	10,03	46,00	43,27	5835	83,84	Sangat baik
MAN Purwakarta	0,11	1,57	12,40	44,99	40,92	3556	81,75	Sangat baik
SMA Darangdan	0,00	1,42	13,80	47,11	37,66	3651	81,22	Sangat baik
SMA PGRI 3	0,69	0,78	6,67	36,76	55,11	3330	85,06	Sangat baik
SMA Pasundan	0,00	0,33	5,66	65,45	28,56	1803	82,90	Sangat baik

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2016

Tabel di atas menunjukkan terdapat variasi respon sikap, siswa SMA PGRI 3 misalnya sebagian besar menyatakan sikap *sangat setuju* dibandingkan siswa dari sekolah yang lain yaitu sebesar 55,11 %, sedangkan SMA Darangdan walaupun jumlah siswanya yang menyatakan sikap *sangat setuju* lebih sedikit dari sekolah yang lain tetapi tidak terdapat siswa yang menyatakan sikap *sangat tidak setuju*. Tabel 4.2 di atas menunjukkan secara keseluruhan semua siswa pada masing-

masing sekolah bersikap *sangat baik* dalam merespon item nilai Pancasila, hal ini sesuai dengan hasil analisa data sebelumnya yaitu pada tabel 4.1.

c. Respon Sikap Siswa Per Item Pernyataan Nilai Pancasila

Respon sikap siswa berdasarkan responnya terhadap setiap item pernyataan nilai Pancasila, diperoleh hasil seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Respon Sikap Siswa Per Item Pernyataan Nilai Pancasila

No Item	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Ragu-ragu	Setuju	Sangat setuju	Jumlah Skor	Interpretasi
	%	%	%	%	%	%	
1	0	0	0	21,19	73,51	94,7	Sangat baik
2	0	0	0	32,32	58,28	90,6	Sangat baik
3	0,13	0,26	21,9	39,21	13,25	74,7	Baik
4	0,4	2,38	1,99	28,61	52,98	86,36	Sangat baik
5	0,53	2,12	27	22,78	18,54	70,99	Baik
6	0,13	0,26	7,55	40,26	35,76	83,97	Sangat baik
7	0,13	1,32	15,5	44,5	14,57	76,03	Baik
8	0	1,59	5,17	52,45	21,85	81,06	Sangat baik
9	0	0	6,75	51,39	24,5	82,65	Sangat baik
10	0	0,26	8,34	48,74	24,5	81,85	Sangat baik
11	0	0,53	2,38	36,03	49,67	88,61	Sangat baik
12	0,66	3,18	5,56	34,97	35,76	80,13	Baik
13	0	0,26	1,19	41,32	45,7	88,48	Sangat baik
14	0,26	0,26	15,5	40,26	21,85	78,15	Baik
15	0	0,26	0	24,9	68,21	93,38	Sangat baik
16	0	0,53	7,95	38,68	37,09	84,24	Sangat baik
17	0,66	3,97	25,8	29,14	7,285	66,89	Baik
18	0,13	0	2,38	22,78	66,89	92,19	Sangat baik
19	0	0	1,99	39,21	47,68	88,87	Sangat baik
20	0	0	0,79	34,44	55,63	90,86	Sangat baik
21	0,26	1,32	12,3	45,56	17,88	77,35	Baik
22	0,13	0,53	25,8	40,26	4,636	71,39	Baik
23	0,26	1,32	14,7	42,38	17,88	76,56	Baik
24	0	0	3,18	47,68	35,1	85,96	Sangat baik
25	0	0	5,56	50,86	27,15	83,58	Sangat baik
26	0	0,26	15,1	49,27	12,58	77,22	Baik
27	0	1,85	5,56	36,56	40,4	84,37	Sangat baik
28	0	0,53	0,79	36,56	51,66	89,54	Sangat baik
29	0	0,79	3,97	41,32	39,74	85,83	Sangat baik

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2016

Tabel 3. menunjukkan variasi respon sikap siswa terhadap masing-masing item nilai Pancasila, untuk item nomor satu dan item nomor dua yaitu tentang hak beragama dan ketenangan beribadah semua siswa bersikap *setuju* bahkan *sangat setuju*. Disamping itu walaupun persentasenya relatif kecil, terdapat siswa yang bersikap *sangat tidak setuju* terutama pada item nomor 12 tentang *kebebasan mengemukakan pendapat*, kemudian item nomor 17 tentang *nasionalisme*, juga item nomor lima tentang *kesamaan dimata hukum dan pemerintahan*.

2. Analisis Data Kuantitatif Respon Sikap Siswa di SMU Purwakarta Terhadap Pernyataan Karakter Bangsa

a. Respon Sikap Siswa Terhadap Item Pernyataan Karakter Bangsa

Dengan prosedur dan proses yang sama dengan pengolahan data kuantitatif respon sikap nilai-nilai Pancasila, maka berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada lampiran 9, diperoleh hasil pengolahan data respon sikap siswa terhadap item karakter bangsa sebagai berikut:

Tabel 4. Respon Sikap Siswa Terhadap Pernyataan Karakter Bangsa

Respon Sikap	Bobot Skor	Frekuensi	Jumlah Skor	%
Sangat tidak setuju	1	46	46	0,31
Tidak setuju	2	101	202	1,38
Ragu-ragu	3	500	1500	10,24
Setuju	4	1979	7916	54,02
Sangat setuju	5	998	4990	34,05
Jumlah		3624	14654	

% jumlah skor dari total skor maksimum = $(14654/18120) \times 100\% = 80,87\%$

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2016

Dari tabel 4. terlihat bahwa sebagian besar siswa merespon dengan *setuju* terhadap pernyataan karakter *bangsa* yaitu dengan persentase terbesar 54,02%, bahkan terdapat juga siswa yang merespon dengan sikap *sangat setuju* dengan persentase cukup besar yaitu 34,05%. Secara keseluruhan dengan memperhatikan persentase skor total, maka siswa merespon seluruh item pernyataan

karakter bangsa pada kategori sikap *sangat baik*.

b. Respon Sikap Siswa Per Sekolah Terhadap Pernyataan Karakter Bangsa

Respon siswa untuk setiap sekolah, dengan prosedur analisa data yang sama dengan nilai Pancasila, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Respon Sikap Siswa Per Sekolah Terhadap Pernyataan Karakter Bangsa

Sekolah	% Skor					Total Skor	% Total Skor	Interpretasi
	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Ragu-ragu	Setuju	Sangat setuju			
SMA 2 Purwakarta	0,17	1,30	11,41	56,77	30,35	4629	80,36	Baik
MAN Purwakarta	0,27	1,25	12,97	51,61	33,90	2891	80,31	Baik
SMA Darangdan	0,27	1,29	13,57	57,82	27,04	2940	79,03	Baik
SMA PGRI 3	0,77	1,68	5,36	35,71	56,49	2744	84,69	Sangat baik
SMA Pasundan	0,07	1,52	3,52	76,97	17,93	1450	80,56	Sangat baik

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2016

Pada tabel 5. terlihat terdapat dua sekolah yang merespon dengan sikap yang termasuk kategori *sangat baik*, karena siswa pada

kedua sekolah tersebut sebagian besar memberikan respon *setuju* bahkan *sangat setuju*. Tabel tersebut juga memperlihatkan

walaupun terdapat variasi interpretasi akhir pada masing-masing sekolah, namun variasi tersebut sangat kecil, sehingga secara keseluruhan masing-masing sekolah merespon dengan *sangat baik* sesuai dengan hasil analisis pada tabel 4.4. Untuk lebih jelasnya, tabel 4.6 merupakan hasil dari pengolahan data berupa respon sikap siswa berdasarkan item pernyataan karakter bangsa.

c. Respon Sikap Siswa Terhadap Per Item Pernyataan Karakter Bangsa

Seperti halnya respon terhadap pernyataan nilai-nilai Pancasila, respon sikap terhadap pernyataan karakter bangsa untuk setiap itemnya terdapat variasi respon. Untuk item nomor 9, nomor 13 dan nomor 18 misalnya, sebagian besar siswa merespon dengan sikap *setuju* dan *sangat setuju*, tidak satupun siswa yang merespon dengan sikap *tidak setuju* apalagi *sangat tidak setuju* namun prosentase siswa yang menyatakan *ragu-ragu* juga cukup banyak terutama untuk pernyataan nomor 9 yaitu tentang usaha-usaha menjaga keutuhan bangsa.

Tabel 6. Respon Sikap Siswa Per Item Pernyataan Karakter Bangsa

No Item	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Ragu-ragu	Setuju	Sangat setuju	Jumlah Skor	Interpretasi
	%	%	%	%	%	%	
1	0	1,32	3,18	29,67	54,3	88,48	Sangat baik
2	0,13	3,97	27,8	24,37	12,58	68,87	Baik
3	0	0,79	7,55	50,33	22,52	81,19	Sangat baik
4	0	1,32	3,97	43,44	35,76	84,5	Sangat baik
5	0	0,26	15,1	51,92	9,272	76,56	Baik
6	0	0,26	8,74	46,09	27,15	82,25	Sangat baik
7	0,4	0,79	15,1	36,03	25,83	78,15	Baik
8	0,13	2,65	19,1	41,32	9,272	72,45	Baik
9	0	0	8,74	54,04	17,88	80,66	Sangat baik
10	0	0,26	3,18	34,44	50,99	88,87	Sangat baik
11	0,4	1,06	5,56	49,27	24,5	80,79	Sangat baik
12	0,13	0,26	6,36	56,69	17,22	80,66	Sangat baik
13	0	0	1,59	34,44	54,3	90,33	Sangat baik
14	0	0,26	5,17	53,51	23,84	82,78	Sangat baik
15	0,13	0,26	6,36	48,21	27,81	82,78	Sangat baik
16	0	0,53	7,95	53,51	18,54	80,53	Sangat baik
17	0	0,26	1,99	36,56	50,33	89,14	Sangat baik
18	0	0	4,77	46,62	33,77	85,17	Sangat baik
19	2,25	9,01	3,97	28,61	23,84	67,68	Baik
20	0,26	0,53	6,75	52,45	20,53	80,53	Sangat baik
21	0,4	0,53	10,7	52,45	13,25	77,35	Baik
22	1,59	1,59	13,1	32,32	25,83	74,44	Baik
23	0,26	0,53	7,55	48,21	24,5	81,06	Sangat baik
24	0	0,26	4,37	43,97	37,09	85,7	Sangat baik

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2016

Pembahasan Hasil Penelitian Posisi Nilai Pancasila pada Mata Pelajaran PKn

Perilaku yang mendukung Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa pada Tuhan

Yang Maha Esa, dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, dengan menghormati kegiatan ibadah agama lain, melaksanakan ibadah sesuai agamanya, serta tidak memaksakan agama pada orang lain.

Perilaku yang bersifat kemanusiaan

yang adil dan beradab, di mana kita sebagai umat manusia memperlakukan setiap orang sebagai manusia yang punya hak dan kewajiban yang sama, serta membiasakan diri menolong guna menegakkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menempatkan hak asasi manusia sesuai dengan kondisi dan situasi negara Indonesia tanpa mengurangi arti hak asasi manusia secara internasional. Perilaku yang mendukung Persatuan Indonesia, yaitu dalam masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan kepentingan, antara lain membiasakan diri untuk bersama-sama menegakkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, dan memperlakukan sama setiap orang tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Perilaku yang mendukung sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan, sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, serta kepentingan mampu diatasi oleh musyawarah mufakat. Perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial, yaitu membiasakan diri untuk hidup hemat, bekerja keras, membiasakan diri untuk bergotong royong dalam rangka kesejahteraan umum.

Mata pelajaran PKn juga mengupayakan agar siswa mampu berucap, dan bersikap serta berperilaku, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik itu norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Pengetahuan dan kemampuan dasar berkaitan dengan hubungan antar warga negara dengan negara, serta menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pada waktu ketua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, membuka sidang pada tanggal 1 Juni 1945, beliau mengemukakan bahwa salah satu hal yang penting yang harus difikirkan adalah tentang

dasar negara bagi negara yang akan didirikan. Kemudian Bung Karno mengartikannya sebagai dasar negara Indonesia Merdeka, yang dalam bahasa Belanda disebut *philosofische grondslag*, yang dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 disebut Pancasila.

Dalam sidang selanjutnya yakni dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), Pancasila disepakati oleh para anggota bahwa dasar negara adalah Pancasila, meskipun hal tersebut tidak tercantum secara eksplisit, tetapi rumusan sila-silanya dicantumkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar Negara merupakan hal yang penting bagi warga negara sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Ideologi berasal dari kata Yunani *idein* yang berarti melihat, dan *logia* yang berarti kata atau ajaran, sehingga ideologi adalah ilmu tentang cita-cita, gagasan, atau buah fikiran. Ideologi dalam kamus Besar bahasa Indonesia mempunyai makna kumpulan konsep yang bersistem yang dijadikanm asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.

Cita-cita bangsa yang tercantum di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 berisi kesadaran dan komitmen yang kuat. Di dalam isi pembukaan UUD 1945 itu mengandung nilai-nilai Pancasila, yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta menjadi roh bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat.

3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Negara, dan Masyarakat

Eksistensi Pancasila dapat dikaitkan dengan teori kausalitas Aristoteles, di mana segala sesuatunya mempunyai empat sebab/ kausal/ asal mula yaitu:

- a. Kausal materialis, yaitu sebab atau asal mula bahan. Kausal materialis Pancasila adalah adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama-agama bangsa Indonesia;

- b. Kausa efisien, yaitu sebab atau asal mula karya. Kausa efisien Pancasila adalah kegiatan BPUPK dalam merumuskan Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara, dan kegiatan PPKI dalam mengesahkan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia;
- c. Kausa formalis, yaitu sebab atau asal mula bentuk. Kausa formalis Pancasila adalah rumusan Pancasila dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945;
- d. Kausa finalis yaitu sebab atau asal mula tujuan. Kausa finalis Pancasila adalah dijadikannya Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Pancasila merupakan tuntunan yang fungsional dari kedudukan dan fungsi dasar negara Pancasila sebagai sistem kenegaraan Republik Indonesia, serta dapat membentuk watak bangsa yang berkarakter unik sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa ini, sebagai berikut: Taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa; mampu mengakui persamaan derajat manusia; mampu menghargai perbedaan pendapat, serta memiliki sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, melalui perjuangan untuk meneruskan kendali dalam mengelola negara di masa yang akan datang.

Kontribusi Nilai Pancasila dalam Memperkaya Materi PKn dalam Pembentukan Karakter Bangsa

1. Muatan Nilai Pancasila dalam PKn

PKn merupakan bidang studi yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan. PKn menurut Chreshore (dalam Winataputra dan Sapriya, 2003: 95) memiliki ontologi pokok ilmu politik, khususnya konsep *political democracy* untuk aspek *duty and rights of citizen*. Aspek instrumental PKn adalah sarana programatik kependidikan yang sengaja dibangun dan dikembangkan untuk menjabarkan substansi aspek-aspek idiil. Ranah ini meliputi keseluruhan potensi sosial-psikologis yang oleh Bloom dkk (1056, Kratswohl (1962)), dikategorikan ke dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang secara programatik diupayakan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya melalui kegiatan pendidikan. (Winataputra, 2006: 13).

b. Karakter Bangsa Indonesia

Pembentukan karakter bangsa melalui penanaman nilai Pancasila terhadap siswa merupakan suatu keharusan. Salah satu mata pelajaran yang memuat pendidikan nilai adalah mata pelajaran PKn. Sebagai salah satu mata pelajaran yang memuat pendidikan nilai, PKn digunakan “sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa” (Depdikbud 1994: 2).

Fenomena globalisasi di samping memberi dampak positif, juga berdampak negatif, yakni menimbulkan ancaman terhadap integritas bangsa, karena globalisasi adalah dominasi dan intervensi dalam bentuk baru. Hegemoni kebudayaan akan terjadi, karena kebudayaan asing akan masuk untuk menggantikan kebudayaan asli, sehingga menimbulkan ancaman kebudayaan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan politik, serta terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Memperkokoh rasa kebangsaan, itulah kunci kesuksesan yang harus ditanamkan pada anak bangsa, melalui pendidikan. Jika tidak, maka pembangunan tidak akan pernah berhasil, dan kita akan tetap larut dalam putaran masalah, serta menjadi pecundang.

2. Strategi dalam Pembelajaran PKn

Kepeloporan generasi muda dalam pembentukan karakter bangsa, harus dupayakan, agar keberadaan bangsa dengan karakter yang unik tetap lestari. Mengenai kemampuan untuk menajaring minat siswa, diharapkan seluruh peran masyarakat dan pemerintah untuk membantu terlaksananya pendidikan ke arah yang lebih maju.

Adapun pendekatan “*problem solving*” sangat sulit dilakukan oleh guru, karena guru sering terbentur antara fakta dan teori. Guru dituntut lebih responsif dengan masalah-masalah politik, akan tetapi sebagian besar memiliki rasa takut untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya. Maka guru harus membuat kelas-kelas pada pembelajaran

PKn, agar menjadi kelas yang demokratis, sehingga tidak ada lagi tekanan, rasa takut, dan ketidak mampuan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada di lapangan.

3. Metode Tepat dalam

Mengimplementasikan Nilai Pancasila pada Mata Pelajaran PKn

Keteladanan, ceramah, petatah-petitih, dan pendekatan-pendekatan yang tepat dapat dilakukan untuk mengimplementasikan nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn guna peningkatan karakter bangsa. Proses pembelajaran PKn di kelas X, XI, maupun XII dapat menggunakan berbagai macam metode yang disesuaikan dengan kompetensi dasar. Metode tersebut dapat berupa: diskusi yang dilanjutkan dengan laporan hasil diskusi/presentasi; uji kasus; simulasi, bermain Peran, portofolio. Namun sebetulnya tidak ada metode yang ampuh, hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, maka dari itu diperlukan pemikiran dan kreativitas pendidik yang harus dan mampu membaca apa yang siswa dapat. Metode yang dipakai dalam pelajaran PKn, tergantung pada nilai apa yang akan diberikan pada siswa yang tujuannya adalah pembentukan karakter bangsa.

4. Evaluasi Tepat untuk Menilai Muatan Nilai Pancasila pada Mata Pelajaran PKn dalam Pembentukan Karakter Bangsa

Evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tes (tertulis) dan non tes seperti *brain storming*, studi kasus, peran (sosio drama), dan *unfinish Story* (cerita yang belum tuntas). Bentuk evaluasi yang paling tepat dalam menilai nilai pancasila pada mata pelajaran PKn dalam pembentukan karakter bangsa, ada beberapa macam diantaranya adalah: pilihan ganda, essay, dan skala sikap. Untuk melaksanakan evaluasi harus adanya pengorbanan dari guru.

Evaluasi tepat yang dapat dipakai adalah penilaian dari aspek afektif karena dapat membentuk kepribadian bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Evaluasinya dapat pula dilakukan dengan skala sikap ataupun pengamatan secara langsung. Serta mengadakan tes tertulis untuk mengetahui

sejauh mana siswa memahami nilai – nilai pancasila. Evaluasi juga dapat dilakukan melalui data observasi, dengan meminta bantuan seluruh komponen sekolah, sehingga penilaian terhadap siswa bukan saja merupakan pendapat pribadi. Evaluasi yang dilakukan adalah untuk melihat hasil proses pada mata pelajaran PKn yang diintegrasikan dengan pokok/ sub pokok bahasan adalah melalui skala sikap. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana siswa telah melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Skala sikap dapat dilaksanakan secara terbuka setelah guru mengadakan penilaian, kemudian diperlihatkan kepada siswa, hal ini penting, agar siswa mengetahui serta sadar terhadap sikap-sikap yang dilakukannya adalah merupakan indikator dari karakter bangsa yang diharapkan.

Pemahaman Siswa terhadap Nilai Pancasila pada Mata Pelajaran PKn dapat Diimplementasikan di Lapangan

Pengambilan keputusan (*decision maker*) merupakan salah satu bentuk perbuatan dan hasil dari perbuatan itu disebut keputusan. Ini berarti dengan melihat seorang remaja mengambil keputusan, maka dapat diketahui perkembangan berfikirnya. Pembentukan karakter bangsa melalui penanaman nilai Pancasila terhadap siswa merupakan suatu keharusan. Di mulai dengan pembiasaan, maka kunci terpenting ada dalam pendidikan. Sekolah merupakan institusi resmi pendidikan yang mempunyai kontribusi dalam pembentukan karakter bangsa, maka seluruh komponen sekolah dari mulai pimpinan sampai penjaga sekolah harus memberikan teladan kepada siswa melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan masalah, maka pada bagian ini akan dikemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan, terutama yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Posisi nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn adalah kuat. Pancasila sebagai

filosofi bangsa, dan ideologi negara, secara yuridis formal masih tercantum di dalam konstitusi, dan menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Kontribusi nilai Pancasila dalam memperkaya materi Pkn dalam pembentukan karakter bangsa sangat besar. Nilai Pancasila terintegrasi satu dengan yang lainnya. Karakter bangsa yang diharapkan dalam Pkn adalah karakter yang berkepribadian bangsa yang mempunyai identitas yang mencakup kelima sila dalam Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan.
3. Strategi yang dapat dipakai dalam memasukkan nilai Pancasila pada mata pelajaran Pkn, adalah pendekatan kontekstual, dan yang utama adalah membaca tuntutan keharusan, serta instrumennya.
4. Metode tepat yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran Pkn adalah portofolio, Bentuk evaluasi tepat yang dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan, serta skala sikap untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa, yang terpenting meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
5. Pemahaman siswa SMA di Purwakarta secara umum terhadap nilai Pancasila dan karakter bangsa termasuk sangat baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiyanto (2002). *Kewarganegaraan untuk SMA kelas X*, Jakarta: Erlangga
- , (2005). *Kewarganegaraan untuk SMA kelas XI*, Jakarta: Erlangga
- Bogdan, R. C. Dan Biklen, S. K. (1982), *Qualitative Research for Education an introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon
- Brannen, J. (2005). *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Cogan, J.J. (1999) *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*, Bandung: CISED

- Dewantara, K. H. (1962). *Bagian Pertama: Pendidikan*. Jogjakarta: Taman Siswa
- Djahiri, A. K (2004). "Esensi Pendidikan Nilai Moral di Era Globalisasi". Makalah pada Seminar Pendidikan Umum UPI, Bandung
- , A. K. (1992). *Menelusuri Dunia Afektif- Nilai Moral dan Pendidikan Nilai Moral*, Laboratorium Pengajaran PMP IKIP Bandung.
- , A. K. (1998), *Beberapa Pemikiran ke arah Revitalisasi Program Pengajaran PPKn-IPS dan Tata Negara pada Persekolahan*, Bandung: Laboratorium PPKN IKIP.
- , (1996). *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral*. Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Akademik
- Engkoswara (2004). *Iman Ilmu Amaliah Indah: Upaya mencegah kerusuhan, korupsi dan disintegrasi bangsa serta bekal manusia hidup di dunia dan akhirat*, Bandung: Yayasan Amal Keluarga
- Guba G. E. & Lincoln S. (1985). *Naturalistic Inquiry*. London: Sega Publications.
- Bavery Hills
- NCSS (1994) *Curriculum Standard for Social Studies : Expectation of Excellence*, Washington
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Usman, H. Dan Setiadi, P. (2000) *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winataputra, U. S. (2001) *Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi* (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS) Disertasi Doktor PPS UPI Bandung: tidak diterbitkan
- , (2006) *PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) sebagai Pendidikan Disiplin*

- Ilmu: Tantangan Epistemologis, dan Implikasi Pedagogis.* (makalah)
Bandung: UPI
- Winataputra dan Sapriya (2003)
Pengorganisasian Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS di Sekolah Dasar. Bandung
- , (2004)
Kewarganegaraan, Pengembangan Materi, dan Pembelajaran. Bandung
Lab. PKn.
- Pendidikan Model*